MONITORING MEDIA CETAK
BERITA OJK DAN INDUSTRI KEUANGAN

Direktorat Hubungan Masyarakat

13 Mei 2019

OJK WIDE

Tidak terdapat berita terkait OJK Wide di media cetak pada hari ini.

PERBANKAN

Media : Kontan

Gagal Fit and Proper Test

JAKARTA. Posisi orang nomor satu di Bank DKI masih lowong. Sebab pemegang saham Bank DKI membatalkan pengangkatan Wahyu Widodo sebagai Direktur Utama bank pembangunan daerah itu lantaran tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pembatalan pengangkatan Direktur Utama itu tertuang dalam surat keputusan pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) Bank DKI yang diteken Gubernur DKI Anis Baswedan dan Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Arief Nasrudin tertanggal 8 Mei 2019. Pemegang saham juga membatalkan pengangkatan Erick sebagai komisaris.

Pembatalan tersebut sehubungan dengan surat Kepala OJK Regional 1 Jakarta dan Banten pada 12 Februari 2019. Isi surat menyatakan pengangkatan tersebut perlu dipertimbangkan kembali. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dan Perumda Pasar Jaya selaku pemegang saham melakukan perombakan kepengurusan Bank DKI.

Dina Maryanti Hutauruk

Terdapat 1 (satu) berita dengan topik sama yang ditulis media lain, yaitu:

1. Bisnis Indonesia

Anies Siapkan Nama Baru

Bisnis, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyiapkan nama baru calon pengganti Wahyu Widodo yang batal diangkat menjadi direktur utama PT Bank DKI.

Seperti dipublikasikan di *website* Bank DKI, Anies Baswedan membatalkan penunjukan Wahyu Widodo sebagai direktur utama Bank DKI. Pembatalan tersebut karena Wahyu Widodo tidak lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain batal mengangkat Wahyu Widodo menjadi direktur utama, pemegang saham juga membatalkan pengangkatan Erick sebagai komisaris. Pembatalan itu sehubungan dengan surat Kepala OJK Regional 1 Jakarta dan Banten pada 12 Febrauri 2019 yang mengatakan pengangakatan tersebut perlu dipertimbangkan kembali.

Saat ditemui akhir pekan lalu, Anies menyampaikan bahwa pihaknya mengikuti hasil rekomendasi dari OJK setelah dinilai tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan. Oleh sebab itu, dia berjanji akan mengajukan nama baru. "Sesegera mungkin," ujarnya singkat di sela-sela acara buka puasa, akhir pekan lalu.

Wahyu Widodo dan Erik ditunjuk menjadi direktur utama dan komisaris Bank DKI pada 30 Oktober 2018 melalui rapat umum pemegang saham luar biasa menggantikan bankir kawakan Kresno Sedarsi, mantan direktur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Setelah Wahyu Widodo batal diangkat, Sigit Prasowo, Direktur Bank DKI, menjadi pelaksana tugas sementara sampai ditetapkan direktur utama baru.

Corporate Secretary Bank DKI Herry Djufrain mengkonfirmasi mengenai batalnya pengangkatan Wahyu Widodo dan Erick. Menurutnya, ada masalah administrasi yang membuat mereka tidak lolos *fit and proper test* OJK.

"[Ada masalah] administratif dan merupakan kewenangan dari otoritas [OJK]," ujarnya kepada *Bisnis*, Sabtu (11/5).

Saat ini, sambungnya, pihaknya masih menunggu keputusan pemegang saham untuk penunjukan dirut baru. "Kita tunggu saja. Bagaimana pun ada proses dalam pengisian posisi dirut. Selain kewenangan dari pemprov juga harus lulus *fit and proper*. Saat ini, pengisian dirut, oleh Direktur Keuangan Bank DKI, sebagai Plt. Direktur Utama," ujarnya. (M. Wildan)

Media : Kompas

PR Deputi Gubernur Senior BI

Paul Sutaryono
Staf Ahli Pusat Studi BUMN; Pengamat Perbankan; Mantan Assistant Vice President BNI

Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Destry Damayanti, sebagai calon tunggal Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, menggantikan Mirza Adityaswara, segera menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Apa saja pekerjaan rumah (PR) dan tantangan deputi gubernur senior (DGS) ke depan? Sekalipun sudah melepas unsur pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) efektif per 31 Desember 2013, BI tetap memiliki tugas penting. Katakanlah, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter (seperti suku bunga, nilai tukar rupiah, dan inflasi) serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

PR dan tantangan

Lantas, apa saja PR dan tantangan DGS BI? Apa pula langkah strategis untuk mampu menghadapi aneka PR dan tantangan itu? Pertama, walaupun unsur pengawasan perbankan BI sudah beralih ke OJK, BI tetap wajib menjalin koordinasi dengan OJK. Kini, BI dan OJK masing-masing memiliki wewenang menjalankan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial. Koordinasi mesra dapat melahirkan sektor jasa keuangan yang ramah pasar.

Kedua, tantangan eksternal paling krusial berasal dari bank sentral AS (The Fed). Namun, The Fed menegaskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan (The Fed Fund Rate/FFR) pada level 2,25-2,50 persen pada 1 Mei 2019. Mengapa? Gubernur The Fed Jerome Powell menjelaskan, pasar tenaga kerja AS tetap kuat dan aktivitas ekonomi naik pada tingkat yang solid dalam beberapa pekan. Itulah sebabnya The Fed memutuskan mempertahankan FFR.

Namun, sesungguhnya hal itu tak sesuai ekspektasi Presiden Trump. Sebelumnya, Trump telah minta The Fed menurunkan FFR untuk mendorong dan merangsang pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Ekonomi AS tumbuh 3,2 persen, bandingkan dengan Indonesia 5,07 persen per Maret 2019.

Terkait ini, BI hendaknya tetap cermat dalam mengelola setiap perubahan FFR yang dapat memengaruhi suku bunga acuan (BI 7 Day Reverse Repo Rate/BI 7 DRRR) yang kini mencapai 6 persen sejak lima bulan lalu, tepatnya 15 November 2018. Perubahan suku bunga acuan akan memengaruhi tingkat suku bunga deposito yang kemudian menyetrum suku bunga kredit.

Sejauh mana laju suku bunga kredit? Statistik Perbankan Indonesia (SPI) 26 April 2019 menunjukkan bahwa suku bunga rata-rata kredit bank umum naik sangat tipis 7 basis poin (bps) dari 10,51 persen per November 2018 (ketika suku bunga acuan mulai naik dari 5,75 persen menjadi 6 persen) menjadi 10,58 persen per Februari 2019 untuk kredit modal kerja. Sebaliknya, kredit investasi justru turun 15 bps dari 10,51 persen menjadi 10,36 persen dan kredit konsumsi juga turun 12 bps dari 11,80 persen menjadi 11,68 persen pada periode yang sama.

Artinya, bank umum masih mengerem kenaikan suku bunga kredit. Itu sinyal positif untuk merangsang gairah bisnis sektor riil. Namun, risikonya, margin pendapatan bersih (*net interest margin*/NIM) menjadi menipis dari 5,12 menjadi 4,81 persen. Mengapa? Lantaran kenaikan suku bunga deposito lebih tinggi daripada kenaikan suku bunga kredit. Sayangnya, NIM bank umum itu masih lebih tebal daripada bank-bank di ASEAN yang berkisar 2-3 persen.

HERYUNANTO

Ketiga, ada yang mengatakan suku bunga acuan yang relatif rendah ternyata kurang mampu mengangkat kredit perbankan. Harap disadari, suku bunga acuan itu sejatinya merupakan penawaran (*supply side*). Hal yang wajib dipertimbangkan kemudian adalah menggenjot sisi permintaan (*demand side*), seperti melemahnya daya beli masyarakat. Pelemahan daya beli itu mendorong penurunan permintaan produk (barang dan jasa). Kondisi ini membuat pengusaha (sektor riil) menahan produksi. Ujungnya, kredit yang sudah disetujui tetapi belum ditarik (*undisbursed loan*) stagnan atau justru makin gendut. SPI yang diterbitkan OJK mencatat bahwa kredit demikian naik 7,94 persen (*year on year*/yoy) dari Rp 1.473 triliun per Februari 2018 menjadi Rp 1.589 triliun per Februari 2019. Namun, secara bulanan (*month to month*), kredit ini menurun 0,71 persen dari Rp 1.601 triliun per Januari 2019 menjadi Rp 1.589 triliun per Februari 2019.

Sungguh itu kabar baik sebagai simbol kegairahan sektor riil. Apalagi pemilu sudah paripurna sehingga memberikan kepastian politik bagi sektor riil untuk lebih memperkencang produksi setelah masa *wait and see* selama hampir 10 bulan. Karena itu, pemerintah segera menggelontorkan bantuan sosial sekitar Rp 96 triliun. Ditambah lagi Rp 40 triliun untuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara. Sudah barang tentu upaya meningkatkan daya beli masyarakat itu plus gairah belanja pada bulan Ramadhan dan Lebaran dilanjutkan Natal dan Tahun Baru dapat menggeber konsumsi rumah tangga yang kemudian memberikan kontribusi tinggi ke PDB.

Keempat, BI juga wajib terus-menerus memompa likuiditas perbankan sekalipun pernah menyatakan likuiditas tidak ketat tetapi tak merata. Artinya, likuiditas terjadi di bank umum kegiatan usaha (BUKU) 1 dan 2. SPI mencatat bahwa *loan to deposit ratio* (LDR) BUKU 1 (dengan modal inti hingga Rp 1 triliun), BUKU 2 (Rp 1 triliun-Rp 5 triliun) dan BUKU 4 (di atas Rp 30 triliun) masing-masing 83,81 persen, 90,40 persen, dan 90,41 persen per Februari 2019 di tengah ambang batas 78-92 persen.

Sementara itu, LDR BUKU 3 (di atas Rp 5 triliun hingga Rp 30 triliun) justru mencapai 101,71 persen, di atas ambang batas dan rata-rata industri 94,12 persen. Hal itu menyiratkan BUKU 3 yang terdiri atas bank umum papan tengah ternyata justru mengalami likuiditas ketat.

Untuk menaikkan likuiditas bank umum, BI kembali meluncurkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/5/PADG/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Perubahan Ketiga atas PADG Nomor 20/11/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM). RIM dan RIM Syariah yang semula 80-92 persen diubah menjadi 84-94 persen, berlaku 1 Juli 2019. Tetapi, pengenaan sanksi terkait perubahan batas bawah dan batas atas target RIM dan RIM Syariah berlaku 1 Oktober 2019. Sejatinya RIM merupakan giro wajib minimum-*loan to funding ratio* (GWM-LFR) sebagai perluasan dari LDR, sedangkan Penyangga Likuiditas Makroprudensial adalah GWM Sekunder. Dengan bahasa lebih lugas, RIM adalah rasio hasil perbandingan antara kredit yang diberikan dalam rupiah dan valas plus surat berharga korporasi dalam rupiah dan valas yang memenuhi persyaratan tertentu terhadap DPK (deposito, giro, tabungan) plus surat berharga (Paul Sutaryono, *Kompas* 22/4/19).

Kelima, meski BI telah melakukan relaksasi RIM, bank umum terutama BUKU 3 dan 4 tetap wajib berupaya keras untuk mampu memelihara likuiditas. Terlebih ketika dikaitkan dengan kewajiban memiliki rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*/LCR) minimal 100 persen secara berkelanjutan 30 hari ke depan. Kewajiban itu tertuang dalam Peraturan OJK No 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas bagi Bank Umum efektif 23 Desember 2015. Dengan bahasa lebih bening, BI amat disarankan untuk terus memelihara likuiditas perbankan nasional karena likuiditas tetap akan menjadi isu besar di tahun-tahun mendatang. Bank umum akan terus didorong untuk mengerek modal agar mampu menghadapi aneka potensi risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

Mengendalikan utang luar negeri swasta

Keenam, likuiditas ketat itu akan mendorong kian banyak korporasi untuk memburu pembiayaan di luar perbankan, yakni pasar modal atau utang luar negeri. Untuk itu, BI perlu membentengi sistem keuangan dari berbagai potensi risiko mengingat kecenderungan kenaikan pembiayaan di pasar keuangan dan utang luar negeri swasta. Data BI menunjukkan utang luar negeri swasta naik 10,8 persen per Februari 2019 (yoy). Utang luar negeri swasta bersumber dari empat sektor: (1) pengadaan listrik, gas, dan uap atau air panas naik 26,8 persen; (2) pertambangan dan penggalian naik 26,8 persen; (3) jasa keuangan dan asuransi naik 9,34 persen; serta (4) industri pengolahan naik 0,5 persen (*Kontan*, 18/4/2019). Itu bukan sekadar data.

Sarinya, suku bunga pinjaman luar negeri relatif lebih rendah daripada dalam negeri dalam rupiah. Namun, di sana tersimpan risiko tersembunyi (*inherent risks*). Sebut saja ketika nilai tukar rupiah melemah (depresiasi), maka nilai utang luar negeri otomatis akan makin tinggi dalam rupiah terlebih tatkala terjadi risiko gagal bayar (*default*). Plus manakala terjadi penipisan kinerja ekspor. Untungnya, kini jumlah ekspor naik 11,7 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya, Februari 2019, menjadi 14,03 miliar dollar AS per Maret 2019.

Ketujuh, itu semua tidak hanya akan membebani swasta sebagai debitor, tetapi juga BI sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Karena itu, BI pun wajib mengendalikan nilai tukar rupiah, terutama terhadap risiko pelemahan ekonomi global. Kini nilai tukar rupiah masih lemas pada level Rp 14.200-Rp 14.300 per dollar AS yang, antara lain, disebabkan oleh keputusan The Fed yang belum akan menurunkan suku bunga acuannya. Namun, pengumuman hasil pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019 akan menjadi salah satu pendorong penguatan nilai tukar rupiah. Hal itu akan menjadi kepastian politik yang selama ini menghantui sektor riil atau dunia usaha.

Berbekal aneka langkah strategis demikian, BI akan kian mampu memelihara sistem keuangan nasional untuk menyuburkan pertumbuhan ekonomi.

Media : Kontan (Data OJK)

■ KINERJA BANK

Bank Memasang Target Konservatif Pendapatan Bunga di Tahun Ini

JAKARTA. Pertumbuhan pendapatan bunga perbankan di awal tahun 2019 belum terlalu deras. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukan, per Februari 2019 pendapatan bunga bersih (*net interest income*) baru tumbuh 3,42% secara *year on year* (yoy) menjadi Rp 60,95 triliun, naik lumayan dari Rp 58,93 triliun tahun lalu.

Penyebabnya antara lain pendapatan bunga perbankan masih tumbuh lebih pelan dibandingkan beban bunga. Sampai Februari 2019 tercatat beban bunga naik 10,4% yoy menjadi Rp 77,7 triliun. Sedangkan pendapatan bunga baru tumbuh 7,48% secara YoY mencapai Rp 138,65 triliun.

Kendati masih lesu di awal tahun, sejumlah bankir tetap optimistis pertumbuhan bunga masih bisa terangkat di tahun 2019. Ambil contoh, Bank Tabungan Negara (BTN) yang pada Desember 2019 menargetkan pendapatan bunga bersih bisa tumbuh 10%.

Direktur Resiko, Strategi dan Kepatuhan BTN mengatakan, target itu bisa dicapai dengan asumsi kredit BTN naik 10% di 2019. "Upaya yang dilakukan adalah dengan merekomposisi deposito berbiaya mahal dan meningkatkan akuisisi nasabah baru," katanya, Jumat (10/5).

Sementara Bank OCBC NISP Tbk memasang target konservatif untuk pertumbuhan pendapatan bunga tahun ini. Presiden Direktur OCBC NISP Parwati Surjaudaja mengatakan, hanya mematok target satu digit untuk pendapatan bunga bersih. "Terlihat kenaikan suku bunga kredit tidak bisa setinggi kenaikan yang sudah terjadi untuk bunga dana," katanya, Minggu (12/5).

Pendapatan bunga bank di awal tahun ini masih tumbuh lebih pelan dibandingkan pertumbuhan beban bunga.

Pendapatan bunga OCBC NISP per Maret 2019 turun 1% yoy menjadi Rp 1,54 triliun. OCBC NISP berupaya untuk mengendalikan bunga dana sekaligus menjaga rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) di level rendah sebagai antisipasi.

Direktur Keuangan Bank Danamon Satinder Ahluwalia menyebutkan, pendapatan bunga bersih Danamon tahun ini masih tumbuh stabil dengan pencapaian di 2018 tumbuh 2% yoy menjadi Rp 14,43 triliun. Tapi Satinder tetap mengupayakan pendapatan bunga bersih tumbuh hingga 10% tahun ini.

Marshall Sautlan

Media : Bisnis Indonesia (Data OJK)

Pembiayaan Terus Melaju

Bisnis, JAKARTA — Penyaluran pembiayaan bank syariah menggeliat pada awal tahun ini setelah sempat melambat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, pertumbuhannya melebihi pembiayaan bank konvensional.

M. Richard, Ipak Ayu H.N. & Ropesta Sitorus
reduksi@bisnis.com

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total penyaluran pembiayaan, termasuk skema bagi hasil, piutang, dan pembiayaan sewa bank syariah dan unit usaha syariah pada 2 bulan pertama tercatat Rp322,06 triliun, atau naik 13,7% (*year on year*/yoy).

Penyaluran pembiayaan ini dalam tren naik, karena sepanjang 2018 bank syariah dan unit usaha syariah membukukan pertumbuhan 12,2% (yoy).

Jika ditelisik lebih dalam, pertumbuhan penyaluran pembiayaan terjadi pada unit usaha syariah UUS sebesar 23,7% (yoy), sedangkan bank umum syariah tumbuh 7,5% (yoy).

Penyaluran pembiayaan awal tahun ini ditopang oleh seluruh komponen. Hanya saja pembiayaan bagi hasil menunjukkan kontribusi paling tinggi dengan pertumbuhan 27,5% menjadi Rp148,55 triliun.

Direktur utama PT Bank BCA Syariah John Kosasih menuturkan, perseroan masih membukukan pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang positif. Pembiayaan BCA Syariah tercatat tumbuh 11% (yoy) pada kuartal I/2019.

"Pertumbuhan penyaluran pembiayaan kami masih positif. Dalam 3 bulan pertama ini masih tumbuh 11%. Pertumbuhan pembiayaan ini akan kami jaga dan bahkan kami tingkatkan lagi hingga kisaran 12%—15%," katanya, pekan lalu.

Berdasarkan laporan publikasi kuartal I/2019 BCA Syariah, total pembiayaan tercatat Rp4,73 triliun, naik hampir Rp450 miliar dibandingkan dengan Rp4,29 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

John mengutarakan, kontribusi penyaluran pembiayaan masih terpusat pada piutang *mudharabah* untuk segmen konsumer dan pembiayaan bagi hasil *musyarakah* untuk segmen produktif. Kedua segmen tersebut mencakup 95% dari total pembiayaan.

"[Adapun], untuk sektor produktifnya kami masih menggarap sektor yang sama, yakni perdagangan, perkebunan, dan industri," papar John.

PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) juga menyatakan pertumbuhan pembiayaan dua digit pada kuartal pertama tahun ini.

▸ Potensi pertumbuhan perbankan syariah di Tanah Air masih cukup terbuka.

Direktur Utama Mandiri Syariah Toni EB Subari sebelumnya menuturkan kinerja pada kuartal awal cukup signifikan dan berjalan sesuai target perseroan.

"Sampai dengan Maret pembiayaan tumbuh hampir 13%, *outstanding* pembiayaan Rp69,4 triliun. Akhir tahun bisa sampai Rp75 triliun," ujarnya.

Fokus Mandiri Syariah masih pada segmen andalan perseroan, yakni konsumer, serta pembiayaan korporasi dan komersial.

Untuk segmen konsumer, pembiayaan yang disalurkan anak usaha Bank Mandiri itu terdiri dari empat produk utama yakni kepemilikan rumah, kendaraan, pembiayaan pegawai, dan pensiun.

Adapun segmen korporasi, Mandiri Syariah menyalurkan pembiayaan di bidang infrastruktur dan lembaga pendidikan. "Kuartal II kami masih optimis pertumbuhan pembiayaan 12%—13%. *Core*-nya masih di bidang yang sama," kata Toni.

Direktur Bisnis SME dan Komersial PT Bank BNI Syariah, Dhias Widhiyati mengatakan pada kuartal I/2019 perseroan telah menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan pertumbuhan pembiayaan mencapai 23,9% menjadi Rp29,4 triliun dari periode sebelumnya Rp23,7 triliun.

"Kami secara moderat memperkirakan pertumbuhan pembiayaan akan naik sekitar 16%-18%. Sampai dengan akhir tahun, kami akan menjaga tingkat pertumbuhan tersebut dengan fokus lebih pada kualitas pembiayaan," katanya kepada *Bisnis*, Minggu (12/5).

Tren pertumbuhan penyaluran pembiayaan juga ditunjukkan oleh UUS PT Bank CIMB Niaga Tbk. yang membukukan pembiayaan senilai Rp28,04 triliun atau naik 61,1% (yoy) per Maret 2019.

Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menyampaikan, tingginya pertumbuhan penyaluran pembiayaan karena perseroan menggencarkan strategi *syaria first* dalam setiap penawaran produk, baik simpanan maupun pembiayaan. "Kami menerapkan *syaria first* sejak beberapa tahun terakhir. Semua penawaran baik simpanan maupun pinjaman ditawarkan produk syariah terlebih dulu," katanya.

Bahkan, Lani menyatakan, gencarnya promosi *syariah first* mampu membuat pembiayaan ke segmen konsumer menggerus porsi pembiayaan *ritel* CIMB Niaga hingga 30%.

TIDAK SIGNIFIKAN

Sementara itu, PT Bank Syariah Bukopin mengaku masih belum membukukan pertumbuhan pembiayaan yang begitu signifikan pada kuartal pertama tahun ini.

"Kami masih belum tumbuh sepanjang kuartal pertama dan kedua ini, asal tidak turun saja sudah cukup bagus buat kami," *kata Direktur Kepatuhan, Manajemen* Risiko, dan Sumber Daya Insani Bank Syariah Bukopin Adil Syahputra, belum lama ini.

Pertumbuhan pembiayaan yang tidak terlalu moncer pada awal tahun juga dialami UUS PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Direktur Syariah Bank Danamon Herry Hykmanto menyatakan, per April 2019 pembiayaan syariah perseroan mencapai Rp3,5 triliun.

"Pembiayaan secara *overall* tumbuhnya hampir *flat*, per April 2019 cuma 3% secara yoy, belum banyak tumbuh [debitur] yang baru," katanya saat ditemui di Jakarta, akhir pekan lalu.

Lesunya pertumbuhan pembiayaan syariah, kata Herry, lantaran nasabah masih menunda pengajuan pembiayaan.

"Permintaannya agak turun, memang secara siklus pada awal tahun agak sepi. Apalagi portofolio nasabah kami adalah karyawan, pada saat awal tahun kan masih pada sibuk dengan anak sekolah mau ujian. Tapi untuk kuartal II ini trennya sudah mulai naik," katanya.

Namun, apabila melihat potensi permintaan yang mulai meningkat, Herry optimistis target UUS Bank Danamon untuk menggenjot pembiayaan hingga 10% atau menjadi Rp4,5 triliun dapat tercapai pada akhir tahun ini.

Direktur Penelitian, Pengembangan Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK Deden Firman Hendarsyah mengatakan potensi pertumbuhan perbankan syariah di Tanah Air masih cukup terbuka.

Namun, dia mendorong pelaku industri perbankan syariah untuk terus mengembangkan produk demi terciptanya *niche market*.

"Produknya harus terus kita kembangkan. Produk bank syariah harus beda dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Itu harus kita dorong," katanya.

Sebagai informasi, total aset perbankan syariah telah mencapai Rp485,37 triliun, atau 5,98% dari total aset perbankan Indonesia.

PASAR MODAL

Media : Investor Daily

BEI Belum Tentukan Kesimpulan Kisruh Garuda

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) belum menentukan tenggat waktu atas pendalaman kisruh penolakan laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). BEI masih melakukan konsultasi dengan Dewan Standar Akuntan Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Direktur Penilaian Perusahaan BEI IGD N Yetna mengatakan, pihaknya tidak ingin buru-buru dalam menyimpulkan hasil pendalaman laporan keuangan Garuda. Ini dikarenakan BEI masih dalam tahap mengumpulkan berbagai informasi serta opini yang objektif dari lembaga profesional akuntansi, termasuk IAI.

"Kami ingin seobjektif mungkin. jangan saling menjustifikasi. Berikan yang terlibat kesempatan. Sekarang, kami tuntaskan dulu mengumpulkan informasi dari semua pihak," jelas dia di Jakarta, Jumat (9/5)

Nyoman mengatakan, pihaknya juga tidak ingin masalah penolakan laporan keuangan Garuda dibiarkan berlarut-larut. BEI merasa perlu waktu mendalami kontrak Garuda dan PT Mahata Aero Teknologi (MAT) yang berdurasi 15 tahun dalam penyediaan layanan wifi dalam penerbangan. BEI merasa masih perlu mencari berbagai petunjuk dari sisi teknis, utamanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

"Standar untuk mengukur itu kan ada di PSAK 23. Nah PSAK 23 kan tidak berdiri sendiri, kita akan coba diskusi terkait dengan PSAK yang lain seperti PSAK 1. Sehingga nanti terlihat alur *framework*-nya," jelas Nyoman.

Senada dengan BEI, OJK juga belum menentukan mengambil kesimpulan. Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen mengatakan, pihaknya masih perlu meninjau kontrak secara lebih detail, terutama karena rincian kontrak dengan Mahata juga melibatkan anak perusahaan garuda, yakni Citilink.

"Kami belum pelajari dan belum ada kesimpulan. Tapi bukan berarti belum kami dilihat (kontraknya)," kata Hoesen.

Sebagai informasi, Garuda sudah melakukan pemaparan publik isidentil dan menjelaskan motivasi serta latar belakang kerjasama dengan pihak Mahata. Pihak Garuda tetap berpegang teguh pencatatan piutang senilai US$ 241,9 juta atas kerja sama pengadaan WiFi dengan PT Mahata Aero Techonology (MAT) tidak menyalahi standar akutansi. Di sisi lain, pihak Garuda mengaku belum menerima pembayaran dari pihak Mahata atas kerja sama tersebut.

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Garuda Indonesia Fuad Rizal mengakui hingga saat ini perseraon belum menerima pembayaran kerjasama lantaran pihak Mahata masih dalam proses finalisasi dengan para investor.

"Mahata lagi dalam proses finalisasi dengan investor. saya berharap polemik ini cepat selesai jadi investor mereka tidak lari," jelas Fuad saat pemaparan publik di Tangerang, Rabu (8/5)

Fuad tidak menjelaskan secara rinci siapa pihak investor yang dimaksud. Namun, karena bentuk kerjasama dengan model profit sharing dan bentuk zero investment di pihak Garuda, pihaknya merasa tidak ada yang salah dengan bentuk kontrak jangka panjang.

Apabila kontrak dengan Mahata putus atau gagal di tengah jalan, lanjut Fuad, perseroan masih punya hak tagih terhadap kewajiban Mahata.

Sebagai informasi, berdasarkan surat tertanggal 1 Maret 2019 dari Citilink, anak usaha Garuda Indonesia ke Mahata diperoleh informasi bahwa Mahata telah mendapatkan fasilitas pendanaan dari Well Vintage Dubai. (c01)

Terdapat 2 (dua) berita dengan topik sama yang ditulis media lain, yaitu:

1. Kompas

GARUDA INDONESIA

BEI Masih Mendalami Laporan Keuangan

JAKARTA, KOMPAS — PT Bursa Efek Indonesia berkoordinasi dengan sejumlah lembaga untuk mendalami standar akuntansi dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Otoritas bursa baru akan mengambil sikap setelah mendapat masukan dari berbagai pihak yang memiliki kompetensi dalam menilai laporan keuangan.

Direktur Penilaian BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan, pihaknya telah meminta pendapat dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) terkait polemik laporan keuangan Garuda Indonesia.

Terkait polemik ini, dia meminta semua pihak bersabar menunggu keputusan otoritas bursa setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak. "Proses pendalaman masih berjalan," katanya, Jumat (10/5/2019).

Pernyataan ini meluruskan pemberitaan *Kompas*, Jumat (10/5), yang memberitakan otoritas bursa tidak menemukan kesalahan dalam laporan Garuda Indonesia.

Nyoman menegaskan, tidak pernah memberikan pernyataan secara langsung mengenai sejumlah hal, antara lain "Bursa Efek Indonesia tidak menemukan kesalahan pada laporan keuangan tersebut".

Ia juga menekankan tidak menyatakan "Hasilnya, BEI tidak menemukan kesalahan dari laporan ini". Bagian lain yang ditegaskan tidak pernah disampaikan Nyoman adalah "Jika ada laporan tak seusai kami akan meminta perusahaan untuk merevisi dan menyampaikannya kepada publik dan regulator".

Nyoman menambahkan, BEI meminta manajemen Garuda Indonesia segera menggelar paparan publik insidental agar masyarakat dan regulator mendapat informasi secara utuh soal polemik yang terjadi.

Sementara itu, VP Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan menjelaskan, pendapatan yang belum diperoleh dari hasil kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi telah dicatatkan sebagai piutang pada laporan posisi keuangan.

"Kami telah menyampaikan dan berkonsultasi mengenai pemenuhan kewajiban perseroan atas transaksi bersama PT Mahata Aero Teknologi dan menyampaikan laporan keterbukaan informasi di media nasional," katanya.

Penjelasan ini disampaikan untuk mengklarifikasi mengenai pernyataan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak bermasalah atas laporan itu. "Garuda Indonesia bermaksud meluruskan pernyataan yang dimaksud bahwa OJK tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut," kata Ikhsan. (DIM/ARN)

2. Bisnis Indonesia

BEI Telusuri Laporan Keuangan GIAA

Bisnis, JAKARTA — PT Bursa Efek Indonesia tengah menelusuri dugaan *window dressing* yang dilakukan PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA).

Direktur Penilaian Perusahaan, I Gede Nyoman Yetna menuturkan, BEI telah melakukan diskusi dengan Institus Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebanyak dua kali untuk membahas kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia. Selain itu, BEI juga menggelar diskusi dengan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

"Kami juga akan berkoodinasi dengan OJK. Kami sudah mendapatkan beberapa informasi. Yang penting adalah bagaimana penguatan dari sisi standar itu sendiri," ungkapnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (10/5).

Nyoman mengungkapkan, standar paling penting adalan intensi manajemen saat proses pengakuan dari transaksi ini. Dia menambahkan, pendalaman yang dilakukan BEI adalah mengamati kontrak transaksi, prosedur dan mekanisme audit, dasar melakukan pencatatan hingga proses auditor bekerja.

Dia enggan menyampaikan secara detail, tindakan yang diberikan kepada Garuda Indonesia. Namun, BEI juga memberikan kesempatan Garuda Indonesia untuk melakukan klarifikasi kepada publik.

Adapun Garuda Indonesia menggunakan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 23. Menurut Nyoman, PSAK 23 tidak berdiri sendiri.

"Intinya begini, dasar untuk mengakui dan pengakuan itu dilakukan PSAK. Nah PSAK 23 itu tidak berdiri sendiri, apakah terkait PSAK 1 kerangka kerjanya?"

Baru-baru ini, Garuda membantah alasan memasukkan transaksi perjanjian kerja sama dengan Mahata Aero Teknologi sebagai upaya *window dressing*.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Fuad Rizal, sebelumnya, mengatakan bahwa performa saham berkode GIAA tersebut sudah berjalan baik hingga hingga pertengah Maret 2019 dan menyentuh angka tertinggi pada 6 Maret 2019 Rp630 per saham.

"Menepis persepsi publik kalau dengan transaksi ini terjadi *window dressing* karena laporan keuangan 2018 baru ada 28 Maret 2019," ujarnya di Cengkareng, Tangerang, Rabu (8/5).

Dalam penjelasannya, Fuad mengatakan terdapat dua transaksi pada perjanjian kerja sama layanan konektivitas dalam penerbangan dan pengelolaan layanan hiburan di dalam pesawat.

Pertama, yaitu biaya kompensasi atas penyerahan hak pemasangan layanan konektivitas serta pengelolaan *in-flight entertainment*. *Kedua*, bagi hasil (*profit-sharing*) atas alokasi *slot* untuk setiap pesawat terhubung selama periode kontrak.

"Atas transaksi tersebut, Garuda Group mengakui pendapatan yang merupakan pendapatan atas penyerahan hak pemasangan konektivitas, seperti halnya *signing fee* atau biaya pembelian hak penggunaan hak cipta untuk bisa melaksanakan bisnis," katanya kala itu.

Menurutnya, hal itu tidak melanggar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23, karena secara subtansi pendapatan dapat dibukukan sebelum kas diterima.

Pada penutupan perdagangan Jumat (10/5), sahaM GIAA naik 4,85% ke level Rp432. *(Novita S. Simamora)*

Media : Republika

OJK Dorong Emiten Terbitkan Sukuk

● RETNO WULANDHARI
IDEALISA MASYRAFINA

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong emiten untuk lebih banyak menerbitkan sukuk. Direktur Pasar Modal Syariah OJK Fadilah Kartikasasi mengungkapkan, jumlah emiten yang menerbitkan sukuk relatif masih sedikit. Pasar sukuk di Indonesia pun saat ini masih didominasi oleh instrumen pemerintah.

"Emiten yang menerbitkan sukuk itu-itu saja, tidak banyak menyebar ke perusahaan lain. BUMN yang kita harapkan juga belum banyak," ujar Fadilah dalam acara diskusi dengan media, Kamis (9/5) malam.

Fadilah menjelaskan, baru 22 sukuk korporasi yang diterbitkan per April 2019 dan berasal dari enam emiten. Total nilai sukuk yang diterbitkan, yaitu sebesar Rp 3,33 triliun.

Secara total, sejak 2013 hingga saat ini, nilai *outstanding* sukuk korporasi mencapai Rp 24,28 triliun dengan jumlah 120 sukuk. Sedangkan, nilai *outstanding* sukuk negara saat ini mencapai Rp 686,88 triliun.

Menurut Fadilah, salah satu faktor penyebab rendahnya penerbitan sukuk korporasi adalah emiten belum memahami sukuk. Dia mengatakan, masih banyak emiten yang menilai bahwa sukuk tidak likuid.

Selain itu, kata Fadilah, penerbitan sukuk juga dianggap lebih rumit dari sisi persyaratan dibandingkan menerbitkan obligasi konvensional. Untuk menerbitkan sukuk, emiten diharuskan memiliki *underlying asset*. Di samping itu, emiten juga wajib memiliki tim ahli syariah (TAS).

"Memang ada tambahan biaya sedikit untuk TAS, tapi tidak signifikan dan bisa dikompensasi dengan penghematan atau potongan 0,05 persen dari emisi," ujar Fadilah.

Menurut Fadilah, satu-satunya cara untuk memberikan solusi atas permasalahan likuiditas adalah dengan memperbanyak suplai. Dengan adanya suplai yang banyak, otomatis likuiditas akan meningkat.

Selama ini, Fadilah mengungkapkan, OJK juga telah berusaha memberikan insentif pengurangan biaya registrasi untuk penerbitan sukuk. Emiten sudah bisa langsung menerbitkan sukuk setelah satu tahun melakukan penawaran umum berkelanjutan (PUB). Sedangkan untuk menerbitkan obligasi harus menunggu hingga dua tahun setelah PUB.

Sementara, transaksi reksa dana syariah diharapkan meningkat signifikan seiring dengan kehadiran platform daring atau digital. OJK menyebutkan, pertumbuhan dana kelolaan atau nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana syariah meningkat 200 persen dalam lima tahun terakhir.

"Perkembangan industri reksa dana syariah dalam lima tahun ke depan diperkirakan akan meningkat pesat berkat digital. Apalagi, dengan berkembangnya generasi milenial yang produktif menghasilkan dan membelanjakan uang serta mayoritas Muslim. Dari situ, pangsa syariah masih sangat luas," kata Deputi Direktur Pasar Modal Syariah OJK, M Touriq.

Dibandingkan sistem konvensional, dana kelolaan reksa dana syariah memang terbilang masih kecil, yakni Rp 35,38 triliun per April 2019 dibandingkan dengan total keseluruhan dana kelolaan reksa dana di Indonesia yang mencapai Rp 520,9 triliun.

■ ed: ahmad fikri noor

Media : Republika

Pasar Modal Syariah Mendominasi

● RETNO WULANDHARI

Edukasi dan pendekatan kelembagaan ditempuh untuk membesarkan keuangan syariah.

JAKARTA – Kontribusi terbesar terhadap perkembangan keuangan syariah di Indonesia masih berasal dari sektor pasar modal. Padahal, Indonesia memiliki lembaga keuangan syariah terbanyak baik perbankan maupun nonperbankan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset industri keuangan syariah per Januari 2019 mencapai Rp 1.291,48 triliun. "Jumlah tersebut tidak termasuk saham," ujar Direktur Pasar Modal Syariah OJK, Fadilah Kartikasasi, dalam acara diskusi media, belum lama ini.

Pasar modal syariah, di luar kapitalisasi saham yang tercatat di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), memberikan kontribusi sebesar 55,06 persen atau senilai Rp 711,15 triliun. Angka ini jauh lebih besar daripada aset perbankan syariah yang sebesar Rp 479,17 triliun maupun aset Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah yang senilai Rp 101,16 triliun.

Namun, secara agregat, pangsa pasar industri keuangan syariah di Indonesia baru mencapai 8,55 persen dari total keseluruhan aset di industri jasa keuangan. Adapun komposisi aset di pasar modal per 5 April 2019 didominasi oleh saham syariah yang mencapai Rp 3.804 triliun atau meningkat 6,50 persen secara tahunan (*year on year* atau yoy).

Aset pasar modal syariah selanjutnya didominasi oleh sukuk negara senilai Rp 686,88 triliun atau meningkat 33,48 persen (yoy). Kemudian, disusul aset di reksa dana syariah senilai Rp 36,24 triliun atau meningkat 36,44 persen (yoy) dan sukuk korporasi sekitar Rp 24,23 triliun atau naik sebesar 32,86 persen (yoy).

Untuk mengembangkan pasar modal syariah, lanjut Fadilah, OJK akan lebih gencar memperluas edukasi di kalangan akademisi perguruan tinggi. Saat ini, pihaknya tengah menyempurnakan draf modul pasar modal syariah sebagai standar materi pengajaran di perguruan tinggi.

"Banyak perguruan tinggi yang punya program studi berbau syariah, tapi belum ada pasar modal syariah. Kalaupun ada, kualitas substansinya sangat berbeda," tutur Fadilah.

Dalam acara prapeluncuran Rencana Induk (Masterplan) Ekonomi Syariah Indonesia di Bandung, Jawa Barat lalu, Menteri PPN/Kepala Bappenas yang juga selaku Sekretaris Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Bambang Brodjonegoro, menjelaskan, industri keuangan syariah Indonesia pun tumbuh dengan cukup baik dalam dua dekade terakhir dengan beberapa pencapaian signifikan.

Meski demikian, secara keseluruhan perkembangan keuangan syariah di Indonesia belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut tecermin dari pangsa pasar keuangan syariah Indonesia yang masih relatif kecil, yaitu hanya mencapai 5,3 persen terhadap industri perbankan nasional di 2016.

"Capaian tersebut berada jauh di bawah negara-negara lainnya, seperti Arab Saudi yang mencapai 51,1 persen, Malaysia 23,8 persen, dan Uni Emirat Arab 19,6 persen," kata Bambang.

Karena itu, kata dia, untuk mengembangkan potensi sekaligus menjawab tantangan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia, pemerintah membentuk KNKS melalui Perpres 91/2016 tentang KNKS. "Pembentukan KNKS adalah komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah secara serius," kata Bambang.

Indonesia memiliki lembaga keuangan syariah (LKS) terbanyak di dunia dengan lebih dari 5.000 institusi. LKS tersebut terdiri atas 34 bank syariah, 58 penyedia asuransi syariah, 7 pemodal ventura syariah, 163 BPR syariah, 4.500-5.500 koperasi syariah atau BMT, dan satu unit pegadaian syariah.

Indonesia memiliki nasabah ritel keuangan syariah terbesar dengan total lebih dari 23 juta rekening (Mei 2017), menerbitkan sukuk ritel, dan menciptakan Shariah Online Trading System pertama di dunia.

■ agus yulianto **ed:** fuji pratiwi

Media : Kompas

Berinvestasi Saham Syariah

INVESTASI

Muhammad Musa *dari Otoritas Jasa Keuangan*

Pada 2030, Indonesia diperkirakan akan sampai pada puncak bonus demografi. Penduduk yang berusia produktif antara umur 15 tahun dan 64 tahun jauh lebih besar daripada penduduk usia tidak produktif. Bonus demografi ini bagaikan pedang bermata dua.

Di satu sisi bisa dianggap sebagai keberkahan dari langit jika kualitas sumber daya manusianya mumpuni. Di sisi lain bisa menjadi musibah jika yang terjadi adalah sebaliknya.

Sekarang ini kita bisa berasumsi bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia masih terbilang bagus. Setidaknya dengan fakta bahwa sejumlah anak muda Indonesia sukses mendirikan perusahaan, terutama yang bergerak di bidang jasa berbasis teknologi, seperti Traveloka, Go-Jek, Tokopedia, Kitabisa, Bukalapak.com, dan masih banyak lagi. Mereka adalah anak muda Indonesia yang punya mimpi dan gigih.

Terkait dengan anak muda *jaman now* yang juga dikenal sebagai generasi milenial itu, menurut beberapa survei, hanya sedikit dari mereka yang mau mencari pekerjaan dengan membawa ijazah dan keluar masuk perusahaan.

Mereka umumnya berpikir untuk membangun dan memiliki perusahaan sendiri. Tentu saja tidak semua bisa melakukannya dengan baik. Sesungguhnya, mimpi tersebut lebih bisa terwujud dengan perencanaan keuangan melalui investasi saham di pasar modal.

Tidak sedikit orang beranggapan bahwa berinvestasi saham di pasar modal hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki dana lebih. Anggapan itu tidak benar. Kini, setiap orang bisa membeli saham cukup dengan dana sebesar Rp 1 juta saja, bahkan bisa kurang dari angka itu.

Pasar modal juga tidak hanya menawarkan saham-saham konvensional, tetapi juga saham-saham syariah.

Saham syariah

Tidak ada yang sulit jika Anda ingin mencoba berinvestasi pada jenis saham syariah. Cara berinvestasinya sama saja dengan bermain di saham konvensional. Anda cukup mendatangi perusahaan sekuritas atau agen penjual saham. Di sana Anda dapat memilih saham berjenis syariah yang diminati.

Namun, tentu membeli saham tidaklah sama dan tidaklah semudah membeli kue di toko. Ada beberapa hal yang mesti Anda perhatikan sebelum akhirnya dapat memiliki saham syariah yang diidamkan.

Berikut beberapa langkah yang perlu Anda lakukan saat ingin berinvestasi saham syariah.

1. Kenali saham syariah yang diinginkan

Sangatlah penting untuk mengetahui terlebih dulu seluk-beluk saham yang Anda inginkan sebelum membeli melalui perusahaan sekuritas ataupun agen saham lainnya. Untuk saham syariah, yakinkan terlebih dulu saham yang Anda inginkan ada di dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pihak yang mendapatkan persetujuan dari OJK.

Daftar Efek Syariah ialah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Untuk menetapkan Daftar Efek Syariah, dilakukan *review* minimal setiap enam bulan sekali.

Review Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh OJK dilakukan secara periodik dan insidental. Penerbitan secara periodik dilakukan setiap bulan Mei dan November, berlaku efektif setiap tanggal 1 Juni dan tanggal 1 Desember.

Penerbitan secara insidental dilakukan sewaktu-waktu saat terjadi aksi korporasi dari emiten, seperti adanya penerbitan saham perdana (IPO) sebuah emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Jumlah efek syariah per Februari 2019 sudah 414 perusahaan. Lima tahun sebelumnya masih sekitar 300 saham. Kapitalisasi efek-efek syariah ini lebih dari 47 persen dari kapitalisasi pasar. Daftar lengkap efek syariah ini bisa dilihat di www.ojk.go.id.

Apakah semua saham bisa langsung dimasukkan dalam kategori syariah?

Tentu saja tidak. Saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah apabila saham tersebut diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang di dalam anggaran dasarnya menjelaskan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, atau sebaliknya, tidak menjelaskan kesesuaian syariah pada kegiatan usahanya, tetapi usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Datangi perusahaan sekuritas

Setelah Anda memahami apakah perusahaan yang Anda inginkan masuk dalam Daftar Efek Syariah, segera datangi perusahaan sekuritas tepercaya yang menawarkan saham syariah. Kini sudah ada Sharia Online Trading System. Pastikan perusahaan sekuritas tersebut terdaftar dan diakui keberadaannya oleh OJK.

3. Minta penjelasan kepada petugas

Jika Anda kurang memahami, mintalah penjelasan secara rinci kepada petugas perusahaan sekuritas untuk menjadi pembanding dan pelengkap informasi dari emiten yang Anda inginkan. Setelah itu, isi formulir yang diperlukan.

4. Investasi pada reksa dana syariah

Jika ragu untuk berinvestasi langsung pada saham syariah di pasar modal, Anda dapat mempertimbangkan berinvestasi pada reksa dana syariah.

Hal ini memberi risiko lebih kecil karena ada manajer investasi yang membantu mengelola portofolio investasi. Semisal Anda memilih produk investasi saham, maka manajer investasi akan memilihkan saham-saham terbaik untuk Anda, yaitu saham-saham yang likuid.

Selamat berinvestasi.

Saham Syariah

Saham yang dapat dikategorikan sebagai saham syariah harus memenuhi rasio keuangan sebagai berikut:

- Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%

- Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.

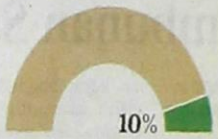

- Kegiatan usaha yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Keuntungan investasi saham

- *Dividen*
  Jika perusahaan memiliki laba dan laba tersebut disepakati untuk dibagikan kepada pemegang saham, semua pemegang saham berhak atas pembagian laba perusahaan tersebut.
- *Capital gain*
  Jika harga saham yang dimiliki oleh investor naik dari harga saham pada saat dibeli, selisih harga jual tersebut menjadi keuntungan pemegang saham.

Risiko investasi

- *Capital loss*, yakni penurunan harga saham.
- **Risiko likuidasi**, yaitu risiko yang terjadi ketika perusahaan dinyatakan bangkrut atau bubarkan.

INFOGRAFIK: LUSUR

Media : Investor Daily

Waskita Beton Segera Rilis Obligasi Rp 500 Miliar

Oleh **Farid Firdaus**

JAKARTA – PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) segera meluncurkan penawaran umum berkelanjutan (PUB) I dengan total target emisi Rp 2 triliun. Pada tahap pertama, perseroan menawarkan sebanyak Rp 500 miliar.

Direktur Keuangan Waskita Beton Precast Anton Y Nugroho mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan belanja modal (*capital expenditure/capex*) tahun ini, perseroan mencari sumber pendanaan eksternal, salah satunya obligasi. PUB I ini akan memiliki periode waktu penerbitan selama dua tahun. Sementara tenor surat utang tersebut sekitar tiga tahun.

"Kami akan meluncurkan tahap pertama PUB ini di Juni. Proses *book-building* akan dilakukan mulai 24 Mei. Saat ini prosesnya masih menunggu pra efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," kata dia usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Jumat (10/5).

Dalam penerbitan obligasi ini, perseroan menunjukan PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Indopremier Sekuritas dan PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia sebagai penjamin efek.

Adapun, perseron telah mengantongi restu pemegang saham dalam rencana untuk memperoleh pinjaman hingga di atas 50% dari aset. Strategi itu ditempuh untuk mendapatkan fasilitas pendanaan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha perseroan ke depannya.

Anton menambahkan, tahun ini perseroan mengalokasikan capex sebanyak Rp 900 miliar. Selain itu, perseron juga membutuhkan modal kerja yang diproyeksikan sekitar Rp 6-Rp 7 triliun sepanjang 2019. Alokasi tersebut demi mengejar target pendapatan tahun ini Rp 10 triliun.

Sesuai rencana, belanja modal tahun ini banyak diserap untuk melanjutkan pembangunan pabrik beton *precast* baru di Balikpapan. Saat ini prosesnya sudah 60% dan diharapkan dapat rampung pada semester II-2019.

"Selain pabrik baru ini, perseroan telah memiliki sebanyak 12 fasilitas pabrik beton di Kerawang, Cibitung, Sadang, Kalijati, Pura Negara, Klaten, Surabaya, Pura Negara, Klaten, Surabaya, Plambon, Gasing Palembang," jelas dia.

Sebagai informasi, saat ini kapasitas produksi precast Waskita Beton mencapai 3,5 juta ton per tahun, dan akan ditingkatkan menjadi 3,75 juta ton per tahun.

Kinerja

Hingga kuartal I-2019, Waskita Beton berhasil mendapat nilai kontrak baru sebesar Rp 2,27 triliun atau 21,84% dari total target kontrak baru tahun 2019 yang sebanyak Rp 10,39 triliun. Perolehan kontrak baru ini naik sebesar 7,1% dibandingkan perolehan kontrak baru pada kuartal I-2018 sebesar Rp 2,12 triliun.

Adapun, kontrak baru ini berasal dari sejumlah proyek besar antara lain Apartemen Tokyo, Proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek Selatan Paket III, Proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing, dan proyek lainnya. Waskita Beton juga telah mendapatkan proyek eksternal dari Group Agung Sedayu dan PT Hutama Karya (Persero) Tbk.

Dalam waktu dekat ini, terdapat proyek yang akan rampung, antara lain proyek Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), I Jalan Tol Kunciran-Parigi. Perseroan turut menyalurkan beton pada proyek tersebut

Selain itu, hingga kuartal II-2019, Waskita Beton menargetkan perolehan kontrak baru sebesar Rp 5,22 triliun, yang berasal dari beberapa proyek besar yaitu Proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi, Addendum Proyek Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM), Proyek Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi, NCICD PUPERA, dan proyek lainnya.

Terdapat 1 (satu) berita dengan topik sama yang ditulis media lain, yaitu:

1. Kontan

Galeri

WSBP Akan Rilis Obligasi Senilai Rp 500 Miliar

JAKARTA. PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS), Jumat (10/5), untuk meminta persetujuan mencari pinjaman yang nilainya lebih dari 50% dari aset. Perusahaan ini berniat menerbitkan obligasi Rp 500 miliar, yang merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB), dengan total nilai sebesar Rp 2 triliun.

"Dikarenakan adanya rencana memperoleh pinjaman hingga di atas 50% dari aset, kami mengadakan RUPS ini sesuai aturan," ujar Direktur Keuangan WSBP, Antonis Yulianto. Masa penawaran obligasi bertenor tiga tahun ini akan dimulai pada 24 Mei 2019, menunggu pernyataan pra efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anton mengatakan, penerbitan obligasi tersebut untuk mendukung anggaran belanja modal Rp 900 miliar di tahun 2019. Pihaknya juga menyiapkan modal kerja hingga Rp 7 triliun. Sebesar Rp 500 miliar dari dana modal kerja ini digunakan untuk melanjutkan pembangunan pabrik beton *precast* baru di Balikpapan. Saat ini prosesnya sudah 60% dan diharapkan dapat rampung ada semester II 2019.

Yoliawan Hariana

Media : Bisnis Indonesia

Meneropong Gurita Bisnis Siam Cement Group di Indonesia

Azizah Nur Alfi
azizah.nuralfi@bisnis.com

Grup konglomerasi asal Thailand Siam Cement Group (SCG) memperbesar bisnisnya di Indonesia, sejalan dengan akuisisi 55% saham produsen kertas kemasan PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (FASW) yang diperkirakan selesai pada kuartal III/2019.

Persentase saham yang dibeli SCG mencapai 1,36 miliar saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor FASW sebesar 2,48 miliar saham. Adapun, nilai akuisisi ini sekitar Rp9,6 triliun yang berasal dari kas internal atau setara dengan Rp7.044,12 per saham.

Melalui keterangan resminya, The Siam Cement Public Company Limited (SCC) melalui anak usaha SCG Packaging Public Company Limited (SCG Packaging) dengan kepemilikan 99,04%, telah masuk ke dalam perjanjian jual beli bersyarat dengan pemegang saham FASW.

Transaksi ini akan dijalankan melalui entitas anak SCG Packaging. Setelah transaksi ini selesai, akan dilakukan penawaran tender wajib sebagaimana diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

President dan CEO The Siam Cement Public Company Limited (SCC) Roongrote Rangsiyopash mengatakan, akuisisi ini memungkinkan SCC untuk meningkatkan pertumbuhan di Asean, terutama di Indonesia.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan besar bagi SCG Packaging pada masa mendatang. "Mengingat populasi Indonesia sebanyak 270 juta jiwa, potensi pertumbuhan pasar kertas hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan Thailand," ujarnya.

Fajar Surya Wisesa merupakan emiten produsen kertas kemasan dengan kapasitas terpasang 1,3 juta metrik ton per tahun, dan tercatat di BEI dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp19,82 triliun. Pada perdagangan Jumat (10/5), saham FASW ditutup pada level Rp8.000.

Pada 2018, perseroan membukukan penjualan bersih senilai Rp9,94 triliun atau naik 35,45% secara tahunan. Adapun, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp1,40 triliun atau naik 141,27% secara tahunan.

• Bersambung ➔12

Meneropong Gurita Bisnis Siam Cement Group di Indonesia (Sambungan dari Hal. 1)

Direktur Utama Fajar Surya Wisesa Yustinus Y. Kusumah mengatakan, SCG Packaging berencana membeli saham-saham dalam perseroan dari pemegang saham perseroan yakni PT Intercipta Sempana, Winarko Sulistyo, Villa Sulistyo, PT Intratata Usaha Mandiri, dan para pemegang saham lainnya yakni PT Garama Dhananjaya dan Hartono Herjanto.

"Setelah pelaksanaan pengambilalihan saham, SCG Packaging akan menjadi pengendali baru perseroan," katanya dikutip dari keterbukaan informasi.

Dia mengatakan, rencana pengambilalihan saham tidak akan berdampak terhadap kondisi keuangan perseroan karena transaksi ini akan dilakukan oleh para pemegang saham perseroan dan SCG Packaging.

Dengan demikian, dana hasil penjualan saham-saham dalam perseroan dalam rencana pengambilalihan saham, akan diterima oleh para penjual dan bukan oleh perseroan.

Perseroan berharap masuknya SCG Packaging sebagai pemegang saham baru akan memperkuat posisi perseroan di industri kertas di Indonesia, serta penetrasi lebih lanjut produk perseroan di dunia, khususnya di wilayah Asean.

"Setelah efektif pengambilalihan saham, SCG Packaging akan menjadi pemegang saham pengendali baru perseroan dan karenanya akan melakukan penawaran tender wajib sesuai dengan Peraturan OJK No.9/POJK.04/2018 tentang pengambilalihan perusahaan terbuka," imbuhnya.

SEJUMLAH PERUSAHAAN

Sebelumnya, SCG telah lebih dulu masuk ke sejumlah perusahaan publik di Indonesia. Di antaranya melalui SCG Retail Holding Co. Ltd. yang memiliki 1,29 miliar saham PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. (CSAP) atau 29% dari jumlah saham. SCG masuk ke CSAP lewat *private placement* senilai Rp800 per saham atau Rp324 miliar pada 16 Juli 2018.

Di sisi kinerja operasional, perusahaan menargetkan untuk memiliki 50 toko Mitra10 pada 2020. Hingga Februari 2019, perseroan mengoperasikan 42 cabang distribusi bahan bangunan di 40 kota, 4 cabang distribusi kimia, 17 area distribusi barang konsumen, 22 toko Mitra10, dan 10 *showrooms* Atria.

Di samping itu, ada SCG Distribution Company Limited memiliki 104,16 juta saham PT Kokoh Inti Arebama Tbk. (KOIN) atau 10,62% dari jumlah saham.

Pada 3 Juni 2011, Asia Investment Capital II Ltd. dan PT Prima Palma Mandiri pemilik 690 juta saham atau 70,35% mengalihkan seluruh sahamnya kepada SCG Distribution Co. Ltd. Setelah melakukan *tender offer*, kepemilikan saham SCG Distribution Co. Ltd. meningkat menjadi 99,09% per akhir 2011.

Per Maret 2019, porsi kepemilikan SCG Distribution Co. Ltd. dalam emiten bersandi KOIN itu mencapai 90,62% dan 9,38% sisanya digenggam oleh investor publik. Saat ini, kapitalisasi pasar KOIN mencapai Rp190,28 miliar.

Selain itu, SCG Chemicals Company Limited memiliki 5,45 miliar saham PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA) atau 30,57% dari jumlah saham. Entitas grup Siam Cement Group itu masuk ke TPIA setelah membeli 7,13% saham dari PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) dan 22,87% saham dari anak usaha Temasek, Apleton Investment Ltd.

Harga saham TPIA dalam transaksi itu disepakati Rp4.088 per saham. Dengan demikian transaksi yang terjadi pada September 2011 itu mencapai nilai Rp3,76 triliun.

Saat ini, produsen petrokimia itu memiliki nilai kapitalisasi pasar Rp98,53 triliun. Adapun, komposisi pemegang sahamnya terdiri atas BRPT 41,51%, SCG Chemicals Co. Ltd. 30,57%, Prajogo Pangestu 12,46%, dan publik 15,46%.

Hans Kwee, Direktur Investa Saran Mandiri, memperkirakan akuisisi ini bakal menjadi sentimen positif terhadap saham FASW. Lebih lanjut, di antara afiliasi SCG di Indonesia, dia tertarik dengan saham CSAP dan FSAW.

CSAP yang bergerak di distribusi bahan bangunan dan kimia itu, berpeluang yang baik sejalan dengan prospek pertumbuhan properti. Begitu pula, FASW memiliki prospek positif karena permintaan terhadap kertas kemasan karton yang meningkat.

Kepala riset Samuel Sekuritas Indonesia Suria Dharman mengatakan, saham TPIA terhitung menarik karena memiliki bisnis yang berbeda dibandingkan dengan afiliasi SCG di Indonesia. Apalagi, TPIA merupakan produsen petrokimia teintegrasi terbesar di Indonesia. "Barito Pacific sebagai induk Chandra Asri, salah satu yang paling banyak dibeli oleh asing. Jadi TPIA ikut terbawa juga," katanya.

Terdapat 1 (satu) berita dengan topik sama yang ditulis media lain, yaitu:

1. Investor Daily

Siam Cement Akuisisi Fajar Surya Wisesa Rp 9,6 T

Oleh **Farid Firdaus**

JAKARTA – Konglomerat bisnis asal Thailand, Siam Cement Group Pcl (SCG) melalui anak usahanya, SCG Packaging Pcl, menandatangani perjanjian jual beli bersyarat untuk mengakuisisi 55% saham PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW). Nilai akuisisi tersebut mencapai US$ 665 juta atau setara Rp 9,6 triliun.

President & CEO Siam Cement Group Roongrote Rangsiyopash mengatakan, transaksi akuisisi ini ditargetkan rampung pada kuartal III-2019. Sumber pendanaan akuisisi berasal dari kas internal perseroan. Guna mencapai pertumbuhan bisnis di masa mendatang, Siam Cement dalam proses studi kelayakan untuk meningkatkan ekuitas SCG Packaging. Studi kelayakan diharapkan selesai pada akhir 2019.

"Akuisisi Fajar Surya Wisesa memungkinkan Siam Cement meningkatkan pertumbuhan di Asean, khususnya Indonesia, yang memberikan peluang pertumbuhan luar biasa pada masa depan," jelas Roongrote dalam keterangan resmi, akhir pekan lalu.

Dia menegaskan, potensi pasar Indonesia terlihat dari jumlah penduduk yang mencapai 270 juta jiwa serta tingkat konsumsi kertas kemasan per kapita. Pihaknya mencatat, potensi pertumbuhan pasar konsumsi kertas kemasan hampir tiga kali lipat dari Thailand.

SCG Packaging, lanjut dia, selama bertahun-tahun melakukan pengembangan bisnis secara progresif lintas ASEAN melalui pertumbuhan organik dan akuisisi. Model bisnis perseroan adalah menjadi penyedia solusi pengemasan yang dilengkapi dengan inovasi untuk pelanggan.

Sementara itu, Direktur Utama Fajar Surya Wisesa Yustinus Y Kusumah mengatakan, SCG Packaging akan membeli 55% saham dalam perseroan dari para pemegang saham perseroan yakni, PT Intercipta Sempana, Winarko Sulistyo, Vivia Sulistyo, PT Intratata Usaha Mandiri, PT Garama Dhananjaya, dan Hartono Herjanto. Nantinya, setelah pelaksanaan pengambilalihan saham, SCG Packaging akan menjadi pengendali baru perseroan.

"Rencana ini tidak akan berdampak terhadap kondisi keuangan perseroan mengingat transaksi tersebut dilakukan oleh para pemegang saham perseroan. Karenanya dana hasil penjualan saham perseroan pada aksi ini akan diterima oleh para penjual, bukan perseroan," kata dia.

Namun, lanjut Yustinus, dengan masuknya SCG Packaging sebagai pemegang saham baru, perseroan berharap langkah ini mampu menguatkan posisi perseroan di industri kertas di Indonesia. Perseroan juga ingin penetrasi lebih lanjut produk perseroan di dunia, khususnya wilayah ASEAN.

Sesuai rencana, setelah SCG Packaging menjadi pengendali baru perseroan, nantinya SCG akan melakukan penawaran tender wajib sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pengambilalihan perusahaan terbuka.

Sebagai informasi, Fajar Surya Wisesa memiliki satu pabrik di Jawa Barat dengan kapasitas produksi mencapai 1,3 juta ton,yang utilitasnya sudah maksimal. Sementara itu, akhir tahun lalu, perseroan mengalokasikan dana sebesar US$ 60 juta untuk mengakuisisi pabrik di Driyorejo, Jawa Timur. Pabrik yang diakuisisi tersebut memiliki empat mesin dengan kapasitas sekitar 280.000-300.000 ton.

Sepanjang tahun lalu, Fajar Surya Wisesa mampu memperoleh laba bersih sebesar Rp 1,4 triliun atau tumbuh 141,37% dari tahun 2017. Pertumbuhan laba bersih tersebut berkat kenaikan pendapatan sebesar 35,4% menjadi Rp 9,94 triliun di 2018,dibanding tahun 2017 yang mencapa Rp 7,34 triliun.

Adapun aksi akuisisi terakhir yang dilakukan Siam Cement Group terhadap perusahaan di Tanah Air adalah mengambil alih 29% saham PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP) pada kuartal III-2018. Ketika itu, Siam Cement membeli saham Catur Sentosa dengan kombinasi saham baru, serta saham yang dimiliki pendiri dan pemegang mayoritas saham pemilik jaringan toko Mitra10 dan Atria tersebut.

Gurita bisnis industri Siam Cement di Indonesia juga telah masuk ke petrokimia. Sebelumnya perseroan menggandeng Barito Pacific untuk memasarkan produk plastik dan turunan *polymer* lainnya. Perseroan telah menginvestasikan 50% saham untuk perusahaan dengan nama PT Nusantara Polymer Solutions (NPS).

Untuk tahap awal, NPS akan menjual Pipa *High Density Polyethylene* (HDPE). Pipa tersebut didatangkan dari pabrikan SCG di Thailand dan anak usaha Barito Pacific, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) di Indonesia.

Media : Kontan

Implementasi PSAK 71, 72, dan 73

Kisah Si Raja Halo-Halo Hadapi Tsunami Akuntansi

Cipta Wahyana

Banyak pengelola korporasi galau menghadapi implementasi PSAK 71, 72 dan 73 pada 2020 mendatang. Di waktu tersisa yang sempit, mereka bisa belajar dari Telkom yang telah mengadopsi standar baru itu lebih awal.

SIANG itu, tak kurang dari 150 orang memenuhi *ballroom* Hotel JS Luwansa yang ada di bilangan Kuningan, Jakarta. Mereka bukan orang sembarangan; setengahnya merupakan direktur keuangan berbagai korporasi. Yang lain, meskipun tak bergelar *chief financial officer* (CFO), sudah pasti mendukuki posisi tinggi di bagian *finance* perusahaan masing-masing.

Ada apa? Para bos *finance* itu berkumpul lantaran ingin memperoleh pencerahan tentang standar akuntasi baru. Hari itu, Kamis, 9 Mei 2019, KOMPAS dan KONTAN menggelar diskusi implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 (Instrumen Keuangan), PSAK 72 (Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan), dan PSAK 73 (Sewa).

Seperti telah ditulis KONTAN, standar baru yang berlaku 2020 itu bakal berdampak besar bagi praktik pencatatan dan pelaporan keuangan korporasi. Jika tidak diantisipasi, ketiganya bisa mendatangkan "tsunami akuntansi" bagi banyak entitas bisnis.

Beruntung mereka bisa belajar dari salah satu senior yang telah menerapkan standar itu terlebih dahulu, yakni PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) atawa Telkom.

Oh, ya, buat yang belum tahu, ketiga PSAK anyar itu merupakan wujud adopsi International Financial Reporting Standard (IFRS) yang berlaku di negara-negara G-20. PSAK 71, 72, dan 73 masing-masing turunan dari IFRS 9, 15, dan 16. Nah, Telkom telah menerapkan IFRS 9 dan IFRS 15 sejak awal 2018 untuk memenuhi persyaratan pencatatan saham di New York Stock Exchange (NYSE). Januari 2019, emiten saham berkode TLKM ini juga mulai menerapkan IFRS 16 tentang sewa.

CFO Telkom Harry M. Zen yang kebetulan menjadi salah satu pembicara dalam diskusi membagikan beberapa tips jitu implementasi tiga standar baru tersebut. "Kita mesti mengantisipasinya sedini mungkin," ujar Harry memulai ceritanya. Telkom telah mempersiapkan implementasi IFRS 9 dan 15 sejak 2016 atau dua tahun sebelum implementasi.

Namun, waktu yang yang longgar saja tidaklah cukup. Butuh arahan yang tegas dari pimpinan, dalam hal ini *chief executive officer* (CEO) sebagai bos tertinggi, agar proses perubahan akuntansi didukung oleh semua pihak dalam perusahaan. "*Tone from the top* yang kuat ini diperlukan agar seluruh pihak memiliki *sense of urgency*," imbuh Harry.

Tetapi, bukankah akuntansi urusan bagian *finance* saja? Jangan salah, implementasi PSAK 71, 72, dan 73 akan mengubah proses bisnis di banyak divisi atau departemen. "Bukan cuma di *finance*, proses bisnis bagian pemasaran, teknologi informasi, dan pengadaan juga harus berubah," tegas Rosita Uli Sinaga, *Senior Partner* Deloitte Indonesia yang juga menjadi pembicara dalam diskusi yang sama.

Karena itu pula, dibutuhkan tim khusus (*dedicated*) untuk mengawal perencanaan (*scoping, assessment* dan *design*), implementasi, serta pengawasan seluruh proses perubahan. Di Telkom, tim ini diawasi oleh dua direktur sekaligus, yakni direktur keuangan dan direktur TI. Mereka juga dibantu konsultan keuangan yang jagoan di industri halo-halo.

Harry menyimpulkan, arahan pimpinan yang tegas, tim khusus (*dedicated*) yang memiliki displin tinggi, pastisipasi aktif seluruh unit bisnis, akurasi data, serta integrasi sistem menjadi kunci sukses implementasi IFRS 9, 15, dan 16 di perusahaannya. "Secara teknis, sebenarnya, tidak terlalu sulit, tapi volume pekerjaan perubahan ini sangat besar," kata Harry.

Sebagai gambaran, untuk mendapatkan model proyeksi kerugian kredit atau piutang (*expected credit loss*) sesuai IFRS 9, tim Telkom mengembangkan tak kurang dari 1.000 model ekonomi.

Demi implementasi IFRS 15, mereka juga harus mengindentifikasi sekitar satu juta *order*. Sementara, implementasi IFRS 16 memaksa mereka membuka kembali 17.000 kontrak sewa.

Nah, bagaimana persiapan perusahaan Anda? Mencermati cerita implementasi IFRS baru di Telkom, boleh jadi, membuat para pengelola keuangan korporasi jeri. Tapi, alih-alih berdiam diri, Anda justru harus segera bersiap diri.

Apalagi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menegaskan, tidak akan ada toleransi dalam penerapan PSAK 71, 72, dan 73 mulai 2020 nanti. "Jangan tunda lagi, segera buat *gap assessment* dan *road map* implementasi hingga Desember 2019, " saran Rosita. ■

Media : Rakyat Merdeka

WAHYU DWI NUGROHO/RM

BERTIGA: (Dari kiri) CFO Telkom Indonesia Harry Mozarta Zen, Financial Service Industry Leader Deloitte Indonesia Rosita Uli Sinaga, dan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK Djustini Septiana menjadi narasumber diskusi Implementasi Standar Akuntasi Keuangan Baru PSAK 71,72, 72, di Jakarta, kemarin.

IKNB

Media : Investor Daily

Bank Wakaf Mikro Hadir di Ambon

AMBON – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso meresmikan Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pondok Pesantren Al-Anshor Kota Ambon, pada 9 Mei 2019.

"BWM merupakan salah satu bentuk upaya Otoritas Jasa Keuangan memperluas penyediaan akses keuangan untuk masyarakat kecil seluruh daerah di Indonesia, termasuk Maluku," kata Wimboh seperti dilansir *Antara*.

Menurut dia, pondok pesantren Al-Anshor Peduli di Ambon dijadikan pusat pengembangan ekonomi umat. Upaya OJK tidak hanya fokus pada pembiayaan nasabah besar atau korporasi, tetapi juga menyasar ke penyediaan akses keuangan masyarakat kecil yang produktif.

Wimboh mengatakan, dengan keberadaan BWM di Kota Ambon setidaknya bisa menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal karena terkendala persyaratan, sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

"BWM dapat menjadi solusi bagi masyarakat di daerah ini yang terkendala dengan agunan atau jaminan ketika mengajukan pinjaman ke perbankan atau lembaga keuangan formal lainnya, sehingga bisa memajukan perekonomian masyarakat," kata dia.

Wimboh menjelaskan, pembiayaan melalui BWM adalah tanpa bunga dengan maksimal plafon pinjaman Rp 3 juta dan hanya dikenakan biaya administrasi sekitar tiga persen per tahun dengan persyaratan mudah. Sebab, dokumen administrasi yang dibutuhkan hanya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).

Selain itu, dalam skema pembiayaan Bank Wakaf Mikro disediakan pelatihan dan pendampingan. "BWM Al-Anshor Peduli di Kota Ambon ini merupakan Bank Wakaf Mikro ke-45 di Indonesia sejak pertama kali didirikan pada 2017. Secara nasional, pada Maret 2019 BWM telah menyalurkan pembiayaan kumulatif ke 15.235 nasabah usaha mikro dengan total pembiayaan sebesar Rp 18,54 miliar," ungkap dia.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Kota Ambon AG Latuheru dalam sambutannya mengatakan, pemerintah Kota Ambon menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas peresmian BWM Al-Anshor Peduli. Sebab, kehadirian lembaga jasa keuangan ini akan memberikan banyak manfaat terutama bagi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kota ini. **(th)**

Terdapat 1 (satu) berita dengan topik sama yang ditulis media lain, yaitu:

1. Republika

BWM PERDANA Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kedua kiri) didampingi Sekretaris Daerah Kota Ambon Anthony Agustaf Latuheru, Chief of Corporate Affairs PT Astra International Tbk Pongki Pamungkas (kanan), dan Direktur PT Federal International Finance (FIF GROUP) Sutjahja Nugroho (kedua kanan) saat melakukan peninjauan ruang kantor Bank Wakaf Mikro (BWM) di Ponpes Al Anshor, Batumerah, Sirimau, Ambon, Kamis (9/5). BWM pertama di Ambon tersebut didirikan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar pondok pesantren.

Media : Kontan

■ FINTECH P2P LENDING

P2P Lending Wajib Cantumkan Tingkat Pengembalian

JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan pengawasan terhadap layanan *peer to peer (P2P) lending* seiring pesatnya pertumbuhan bisnis *financial technology* (*fintech*) ini. OJK mewajibkan semua entitas fintech *P2P lending* yang terdaftar dan diawasi regulator agar menampilkan tingkat keberhasilan pengembalian pada hari ke-90 (TKB 90). Ini menggambarkan rasio keberhasilan pengembalian pinjaman di sebuah platform fintech *P2P lending*.

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi mengatakan, pertama kali buka situs *P2P lending* pada layer pertama di sebelah kanan atas harus dicantumkan TKB 90. Aturan ini diterapkan per April 2019.

Hendrikus mencontohkan, bila sebuah entitas fintech *P2P lending* memiliki TBK 90 hanya 80% dan memiliki imbal hasil atau bunga lebih dari 50%. Artinya ada ketidakberhasilan pembayaran sebesar 20%, Tetapi dengan imbal hasil 50%, maka masih ada keuntungan sebesar 30%.

Regulator berharap, lewat pencantuman rasio ini, calon pemberi pinjaman atau *lender* dapat mengetahui risiko penempatan dana. "OJK mendorong semua (*fintech*) transparan dan biarkan publik tentukan *fintech* pilihannya," ujar Hendrikus, Kamis (9/5).

Hingga Maret 2019, OJK mencatatkan TKB 90 fintech *P2P lending* berada di level 97,38%. Nilai ini turun 117 basis poin dari posisi Desember 2018 di 98,55%. Adapula tingkat rasio wanprestasi. Ini rasio yang menunjukkan tingkat wanprestasi atau ketika peminjam atau *borrower* tidak mengembalikan dana yang dipinjam. OJK menggunakan rasio ini alih-alih menggunakan rasio kredit bermasalah *non-performing loan* (NPL) seperti yang digunakan industri perbankan. Tingkat wanprestasi 90 hari fintech *P2P lending* per kuartal I-2019 sebesar 2,62%. Nilai ini turun dibandingkan posisi Februari 2019 di level 3,18%. Kendati demikian, posisi ini masih lebih tinggi dibanding akhir 2018 di posisi 1,45%.

TKB90 mendorong fintech P2P *lending* agar transparan.

Rasio pengembalian pinjaman itu berasal dari penyalurkan pinjaman di fintech *P2P lending* hingga kuartal I-2019 senilai Rp 33,2 triliun, tumbuh 46,48% bila dibandingkan posisi Desember 2018 senilai Rp 22,66 triliun.

Kuseryansyah Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengatakan, supaya kinerja yang ditampilkan adalah kinerja yang optimal maka pelaku usaha perlu menjalankan *artificial intelligence* (AI) yang bagus, juga memiliki *credit scoring* yang canggih.

Lewat informasi TKB 90 ini, Kus yakin, *P2P lending* akan semakin selektif dalam memilih calon peminjam. Sebab, tingkat keberhasilan akan ditentukan oleh kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjaman.

Direktur Utama PT Kredit Pintar Wisely Reinharda Wijaya menambahkan, di *fintech p2p lending* tidak ada namanya NPL karena perusahaan ini hanyalah *platform* dan tidak menyalurkan dana sendiri. "Dapat di lihat di Kredit Pintar, TKB90 kami 100%," ujar Wisely. Info saja, Kredit Pintar telah mencatatkan penyaluran pinjaman lebih dari Rp 3 triliun ke seluruh wilayah Indonesia hingga Maret 2019.

Maizal Walfajri

Media : Media Indonesia

Fintech Harap Investor tidak Dibatasi

Kebutuhan dana UMKM di Indonesia yang tidak dapat terserap perbankan mencapai Rp1.000 triliun.

HAUFAN HASYIM SALENGKE
haufan_hasyim@mediaindonesia.com

DALAM industri jasa keuangan, salah satu inovasi teknologi yang dapat digunakan masyarakat, yaitu layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. Hal tersebut dikenal sebagai *equity crowdfunding*.

Sejumlah pelaku usaha di bidang teknologi finansial (*fintech*) *equity crowdfunding* di Tanah Air berharap regulator tidak membatasi pendanaan investor dalam proyek yang dijalankan industri ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan terkait dengan *equity crowdfunding*, yaitu POJK Nomor 37/POJK.04/2018 pada 31 Desember 2018.

Aturan baru tersebut diharapkan memberikan ruang bagi perusahaan rintisan (*startup*) untuk memperoleh akses pendanaan di pasar modal sekaligus mendorong dan meningkatkan inklusi keuangan di Tanah Air.

Lebih jauh, POJK itu menetapkan penawaran saham umum melalui *equity crowdfunding* dilakukan maksimal 12 bulan dengan total dana yang dihimpun juga dibatasi maksimal Rp10 miliar. Jumlah pemegang saham penerbit tidak lebih dari 300 pihak dan jumlah modal disetor maksimal sebesar Rp30 miliar.

Pelaku usaha *fintech equity crowdfunding* memberikan sejumlah catatan terhadap POJK itu. Pembatasan tersebut dirasa menghambat pertumbuhan industri terkait. Padahal, instrumen investasi yang terbilang baru di Indonesia itu merupakan alternatif sumber dana bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta rintisan permodalan.

Menurut data OJK, kebutuhan dana UMKM di Indonesia yang tidak dapat terserap perbankan mencapai Rp1.000 triliun. Kalangan yang disebut sebagai *unbanked* inilah yang menjadi salah satu pangsa pasar industri *startup* atau *fintech*.

Melantai di bursa

CEO dan Co-Founder Pramdana, Kresna Satya Prameswara, mengatakan perusahaan *fintech equity crowdfunding* sebaiknya diberikan keleluasaan untuk menggandeng sebanyak mungkin investor. Menurutnya, ini lebih sejalan dengan semangat pemerintah untuk mewujudkan inklusi keuangan.

"Kalau bisa *fintech crowdfunding* (menggandeng) sebanyak mungkin investor sehingga nominalnya akan lebih kecil," ujar Kresna Satya Prameswara, di Jakarta, pekan lalu.

> Instrumen investasi yang terbilang baru di Indonesia itu merupakan alternatif sumber dana bagi pelaku UMKM.

Ia berharap OJK menjembatani *fintech equity crowdfunding* untuk berkembang dan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). "Seharusnya tidak dibatasi karena *at the end of the day* kami juga akan melantai di BEI," ujar dia.

Ia mencontohkan perusahaan rintisan yang bergerak di bidang perumahan di Inggris sudah melakukan langkah itu. Emiten perusahaan yang dikumpulkan lewat urun dana itu kemudian melantai di bursa.

Di sisi lain, Direktur Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Tasa Nugraza Barley mengapresiasi POJK Nomor 37 Tahun 2018 karena memberikan kepastian hukum. Ia juga optimistis dengan dengan peraturan itu bisnis ini akan tumbuh cepat.

Dari sisi OJK, aturan itu disebut mempermudah pengawasan yang mendorong penerapan keterbukaan infomasi oleh penerbit saham, terbentuknya penyelenggara yang kredibel, serta terbangunnya sistem teknologi informasi yang aman dan andal dalam kegiatan urun dana. (S-4)

Media : Kontan

Alami Jadi Tekfin Syariah

JAKARTA. PT Alami Teknologi Sharia Group (Alami) resmi mencatatkan diri di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai teknologi (tekfin) finansial *P2P lending* berbasis syariah per 30 April 2019. Alami menjadi fintech syariah keempat di Indonesia. "Menfaftar ke OJK sejak September 2018 sampai April 2019. Sebelum resmi di OJK belum bisa membuka sistem agar tidak dianggap ilegal, " tutur Pendiri dan CEO Alami Dima Djani kepada KONTAN, Jumat (10/5).

Alami menargetkan, pembiayaan syariah mencapai angka Rp 80 miliar. Khususnya penyaluran pembiayaan ke nasabah dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Membawa konsep syariah, Alami akan menerapkan nilai transparansi dan keadilan dalam transaksi bisnis. Dari sisi penerima pembiayaan (*beneficiary*), Alami menerapkan sistem *credit scoring* untuk menentukan keputusan pembiayaan bagi calon penerima pembiayaan. Baik sisi kuantitatif, yaitu laporan keuangan dan rekening koran bisnis, serta kualitatif, seperti kunjungan ke tempat usaha.

Amalia Fitri

Media : Bisnis Indoensia

Ovo Garap Layanan Kredit Digital

JAKARTA — PT Visionet Internasional (OVO) kini memfasilitasi kredit digital bagi penggunanya melalui fitur Ovo Paylater, yang ditargetkan menembus satu juta pengguna pada akhir tahun nanti.

Adapun, hingga saat ini, aplikasi Ovo telah diunduh di lebih dari 115 juta telepon pintar di Indonesia.

Head of Strategy and Innovation Lab Ovo Abraham Viktor menjelaskan bahwa dengan fitur tersebut, pengguna dapat membayar tagihan pada akhir bulan maupun melakukan pembayaran secara mengangsur.

Pada saat ini, pengguna baru dapat mencoba fitur membayar di akhir bulan, sedangkan fitur cicilan baru dapat digunakan pada Juli mendatang.

Akses kartu kredit virtual ini diluncurkan secara bertahap bagi pengguna aplikasi Ovo, untuk kemudian menyusul hadir di ekosistem Ovo lainnya seperti Grab maupun 200.000 *merchant* lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, fitur Ovo Paylater telah hadir terlebih dahulu di platform dagang-el Tokopedia pada awal tahun lalu.

"Ovo Paylater ini intinya membuat masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya dulu, baik di *e-commerce* dan ritel manapun, kemudian bayarnya nanti. Setelah Juli nanti akan ada fitur *instalment* atau cicilan," ujarnya saat konferensi pers, Jumat (10/5).

Pihaknya menggunakan teknologi algoritma kredit yang telah dikembangkan selama 3 tahun terakhir untuk memverifikasi pemohon Ovo Paylater.

Dengan memanfaatkan teknologi, dia mengklaim proses persetujuan dapat berlangsung secara instan karena tidak ada intervensi manual.

Plafon pinjaman yang disediakan berkisar dari Rp10.000 hingga Rp10 juta, dengan tenor dari 1 bulan hingga maksimal 12 bulan. Abraham mengatakan pihaknya belum menentukan secara pasti besaran bunga yang yang akan dikenakan.

"Rencananya akan ada biaya yang dikenakan, kira-kira sama dengan kartu kredit, tetapi kami belum putuskan berapa," ujarnya.

Dia menuturkan penyediaan fitur ini merupakan hasil kerja sama antara Ovo dengan Taralite, perusahaan *peer to peer lending* yang telah diakuisisi Ovo beberapa waktu lalu.

Melalui kolaborasi itu, Ovo dapat menyalurkan pinjaman dengan menggunakan izin *peer to peer lending* yang telah diperoleh Taralite dari OJK. Sebelum bergabung dengan Ovo, Abraham Viktor merupakan CEO dari Taralite.

Abraham berharap, adanya layanan tersebut dapat membantu Ovo menjangkau 80% populasi penduduk Indonesia yang belum pernah mengakses layanan keuangan. (Deandra Syariska)

Media : Jawa Pos

Masuk RI, Wuling Finance Siapkan Rp 600 M

JAKARTA - Wuling tak setengah-setengah berbisnis di Indonesia. Untuk mendukung penjualan kendaraan di tanah air, *brand* asal Tiongkok itu mengoperasikan PT SGMW Multifinance Indonesia (Wuling Finance). Perusahaan *multifinance* tersebut gabungan dari empat pemegang saham utama. Yakni, SAIC Motor HK Investment Limited, General Motors Financial Company, Wuling Motors, dan PT Sinarmas Multiartha Tbk. Investasi yang ditanamkan Rp 600 miliar.

Presdir Wuling Finance Nathan Sun menjelaskan bahwa perusahaannya berdiri sejak September 2018. Setelah mengurus berbagai perizinan, Kamis lalu (9/5) kegiatan operasional Wuling Finance secara resmi di-*launching*. "Pada tahap awal, kami telah membangun 75 *sales point* untuk mendukung penjualan diler Wuling di Indonesia," ujar Nathan. Pada acara *launching* yang dihadiri perwakilan OJK, pemegang saham, serta mitra diler dan bank tersebut, Nathan menegaskan bahwa saat ini 75 *sales point* itu tersebar di wilayah Jakarta dan Jawa. Wuling Finance juga berencana membangun *sales point* di Sumatera dan Indonesia bagian timur.

SAIC Motor HK Investment Limited adalah anak perusahaan SAIC Motor Corporation, produsen mobil terbesar di Tiongkok. General Motors Financial Company adalah perusahaan penyedia global pembiayaan otomotif yang beroperasi di Amerika Serikat, Amerika Latin, Kanada, Eropa, Tiongkok, dan Asia Pasifik. Selain itu, Wuling Finance didukung Wuling Motors sebagai pabrik mobil Wuling dan Sinarmas Multiartha sebagai salah satu perusahaan keuangan di Indonesia.

Kepala Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 2B OJK Bambang Budiawan menjelaskan, industri *multifinance* di Indonesia dua sampai tiga tahun terakhir sangat dinamis. "Tahun lalu acuannya *double-digit*. Tingkat pembayaran bermasalah juga cukup rendah," ujarnya. **(agf/c6/oki)**

EPK

Media : Rakyat Merdeka

Pinjaman Selama Ramadan Meningkat

OJK: Hati-hati Pilih Fintech

KEBUTUHAN selama Ramadan dan Lebaran pasti meningkat. Tak sedikit masyarakat melakukan pinjaman untuk memenuhinya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau agar lebih berhati-hati dalam memanfaatkan pinjaman daring dari perusahaan teknologi finansial (*fintech lending*).

Direktur Pengaturan, Pengawasan, dan Perizinan *Fintech* OJK Hendrikus Passagi menyebut regulator tengah fokus melindungi konsumen. Alasan inilah yang membuat OJK sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat awam dalam memilih *fintech*.

"Perlindungan terhadap konsumen menjadi prioritas OJK. Dengan melakukan sosialisasi, kami berharap permasalahan yang kerap terjadi seperti masalah penagihan dan gagal bayar pinjaman dapat terus berkurang," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Guna mensukseskan hal tersebut, OJK menggandeng pelaku fintech. Sebab kata Hendrikus, sosialisasi kepada masyarakat tidak cukup hanya dilakukan OJK.

"Partisipasi aktif dari pelaku *fintech* pastinya akan sangat membantu OJK. Jadi, ini merupakan tugas kita bersama-sama untuk memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat," imbuhnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data OJK, jumlah *fintech* yang terdaftar per April 2019 berjumlah 114 perusahaan, bertambah 15 perusahaan dari Februari yang masih 99. OJK April lalu juga telah menutup 144 *Fintech* ilegal sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan industri.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Tumbur Pardede memproyeksi permintaan pinjaman selama Ramadan tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Pada Mei 2018 lalu, tepatnya sebelum Ramadan, jumlah akumulasi penyaluran pinjaman meningkat 13,65 persen.

Sedangkan pada Juni 2018, atau Ramadan jumlah akumulasi penyaluran pinjaman meningkat 24,03 persen. Setelah puasa, Juli 2018, jumlahnya meningkat sebesar 20,55 persen.

"Untuk tahun ini, kami memperkirakan kenaikannya melebihi dari tahun lalu seiring bertambahnya jumlah penyelenggaraan fintech lending dan meningkatnya pemahaman masyarakat soal fintech lending," cetus Tumbur.

Perencana Keuangan dari Zielts Consulting Ahmad Gozali meminta, masyarakat lebih pintar dalam memanfaatkan pinjaman dari fintech lending. Hal ini untuk mencegah timbulnya masalah karena ketidakmampuan masyarakat dalam mengembalikan pinjaman.

"Yang jelas, yang namanya pinjaman harus dikembalikan, maka sebelum memutuskan untuk meminjam, mesti terlebih dahulu punya rencana pengembaliannya. Apalagi uang tunai via *fintech* biasanya memiliki jangka waktu yang sangat pendek dan bunga relatif tinggi," kata Ahmad.

Dia menyarankan masyarakat untuk menggunakan uang pinjaman pada awal puasa agar mudah ketika mengembalikannya. "Misalnya untuk belanja kebutuhan Lebaran di awal Ramadan saat belum terlalu ramai. Pinjam dulu uangnya dan dikembalikan setelah menerima Tunjangan Hari Raya (THR) di akhir Ramadan," terangnya. ■ MEN

Terdapat 2 (dua) berita dengan topik sama yang ditulis media lain, yaitu:

1. Bisnis Indonesia

Jangan Salah Pinjam di Tekfin Ilegal

Memasuki awal Ramadan, para pekerja di kota-kota besar mulai semangat berselancar di platform *e-commerce* untuk berbelanja *outfit* baru, kendaraan baru atau mengarungi aplikasi penjualan tiket untuk mencari tiket pulang kampung.

Nindya Aldila
nindya.aldila@bisnis.com

Ramadan juga menjadi momentum kenaikan tren belanja masyarakat Indonesia. Adanya tunjangan hari raya (THR) menjelang Lebaran semakin mendorong aktivitas belanja masyarakat jika dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya.

Hal itu tercermin dari catatan salah satu platform *financial technology* (*fintech*) *e-commerce*, Shopee, yang menyebutkan transaksi pada Ramadan tahun lalu naik hingga 500% dibandingkan dengan 2017. Bahkan, pada Mei dan Juni pada tahun tersebut, sempat terjadi 1,5 juta transaksi dalam sehari.

Bagi sebagian orang, khususnya yang belum mendapat THR, pinjaman merupakan salah satu jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan menjelang Lebaran.

Di tengah tren perkembangan teknologi digital saat ini, platform pinjaman langsung tunai berbasis teknologi atau tekfin *lending* menjadi salah satu tren baru pilihan pinjaman.

Meminjam kepada tekfin *lending* memang menarik. Tidak seperti meminjam kepada lembaga keuangan konvensional, seperti bank atau *multifinance* dan koperasi, meminjam kepada tekfin *lending* begitu mudah dan cepat.

Hanya bermodal foto kartu tanda penduduk (KTP), peminjam bakal menerima transfer dana sekian juta hanya dalam waktu sekitar 2 jam setelah mengajukan pinjaman. Namun, masyarakat harus hati-hati. Alasannya, kini justru lebih banyak ditemukan layanan tekfin *lending* ilegal atau tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator.

Hanya dari aplikasi Google Playstore, banyak sekali ditemukan nama-nama platform seperti Guntur Dana, Kantong Tunai, Uang Rakyat, dan lain sebagainya yang tidak memiliki kejelasan identitas badan usaha dan tidak terdaftar di OJK.

▸ Di tengah tren perkembangan teknologi digital, platform tekfin *lending* menjadi salah satu tren baru pilihan pinjaman.

▸ Selain Google Playstore, platform media sosial seperti Instagram juga menjadi tempat perkembangbiakan akun pinjaman *online* ilegal.

Selain Google Playstore, platform media sosial seperti Instagram juga menjadi tempat perkembangbiakan akun pinjaman *online* ilegal.

Hal itu pula yang disorot oleh Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing. Dia mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap tawaran fintech yang tidak terdaftar di OJK, khususnya memasuki Ramadan. Tongam tidak hanya menyorot tekfin *lending*, tetapi juga segmen tekfin lainnya.

Pasalnya, ujar dia, menjelang Lebaran, masyarakat cenderung memegang uang cukup banyak. Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat agar waspada terhadap penawaran investasi yang memberikan imbal hasil tinggi dalam waktu cepat.

"Cek legalitas dan rasionalitasnya," tegasnya, pekan lalu.

Bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dari tekfin *lending*, Tongam mengatakan masyarakat harus meminjam pada tekfin yang sudah terdaftar di OJK. *Kedua*, pahami syarat, risiko dan kewajibannya. *Ketiga*, masyarakat diminta meminjam sesuai dengan kemampuan bayar. "Kami menduga masih ada muncul penawaran tekfin ilegal karena mudahnya membuat aplikasi dan web saat ini. Namun demikian, kami tetap monitor dan melakukan pemblokiran secara dini melalui Kemenkominfo."

MEDIA SOSIAL

Di samping menyisir lewat aplikasi Google Playstore, Satgas Waspada Investasi juga terus menyisir keberadaan tekfin ilegal lewat media sosial dan juga pengaduan masyarakat.

Pada Minggu (28/4), Satgas Waspada Investasi telah menjaring 144 entitas yang melakukan kegiatan usaha *peer to peer* (*P2P*) *lending*, tetapi tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK.

Temuan itu menambah daftar panjang tekfin *P2P lending* tidak berizin. Sepanjang 2018 sudah ditemukan sebanyak 404 entitas, sedangkan pada 2019 sebanyak 543 entitas. Dengan demikian, total saat ini yang telah ditangani sebanyak 947 entitas.

Sementara itu, mengacu data OJK, jumlah pinjaman daring yang telah terdaftar/berizin di OJK hingga saat ini mencapai 113 entitas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 107 entitas merupakan penyelenggara bisnis konvensional dan enam entitas bisnis syariah.

Hingga Maret 2019, akumulasi jumlah pinjaman daring sebesar Rp33,2 triliun dengan jumlah *outstanding* Rp7,79 triliun. Sementara itu, rekening pemberi pinjaman sebanyak 272.548 entitas dan penerima pinjaman 6.961.993 entitas.

Hanya dari aplikasi Google Playstore, sebetulnya lumayan mudah untuk mendeteksi platform pinjaman *online* yang ilegal. *Pertama*, konsumen dapat mengecek situs resmi akun tersebut. Kebanyakan platform ilegal tidak memiliki situs resmi. *Kedua*, buka situs resmi OJK. Pada bagian bawah, konsumen dapat dengan mudah menemukan daftar P2P *lending* legal.

Head of Marketing PT Finaccel Teknologi Indonesia (Kredivo) Indina Andamari mengatakan, dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, lonjakan peningkatan permintaan pada bulan puasa memang lebih besar. Namun, dia mengaku tidak khawatir dengan risiko kenaikan kredit macet atau *nonperforming loan*/NPL karena sistem *credit scoring*, *fraud detection* dan proses *collection* tetap berjalan sebagaimana biasa.

"Antisipasinya paling kalau sampai ada tanda perubahan drastis tiba-tiba, maka harus cepat diinspeksi. Tapi biasanya aman kok. *Overall* pertumbuhan kami juga cukup stabil. Jadi setelah Lebaran pun tetap tumbuh," katanya.

Sejauh ini, mayoritas lini bisnis pembiayaan yang dilayani oleh Kredivo yakni *gadget* dan elektronik, lalu diikuti fesyen dan aksesoris.

Direktur Utama PT Kredit Pintar Indonesia Wisely Reinharda Wijaya memastikan siap melayani dan memenuhi kebutuhan *borrower* yang semakin banyak menjelang Lebaran.

Sebagai langkah antisipasi, dia telah menggandeng asuransi kredit yang menjamin pengembalian dana lender apabila ada *borrower* yang tidak membayar pinjamannya.

Sejauh ini, tingkat keberhasilan (TKB) pengembalian dana lender pada hari ke-90 Kredit Pintar mencapai 100%.

"Kami harap agar masyarakat juga dapat meminjam dari *fintech peer to peer lending* yang terdaftar dan diawasi oleh OJK seperti Kredit Pintar," ujarnya.

Tetap Waspada pada Bulan Puasa

Momentum Ramadan dan Lebaran, ketika tingkat konsumsi masyarakat cenderung naik, mendorong Satgas Waspada Investasi untuk mengingatkan kembali masyarakat agar waspada terhadap tawaran *platform financial technology* (*fintech*). Bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dari *fintech lending*, Satgas mengingatkan masyarakat agar meminjam pada fintech legal atau yang telah terdaftar di OJK, memahami syarat, risiko dan kewajibannya platform tersebut, serta meminjam sesuai dengan kemampuan bayar.

Keuntungan :
- Syarat mudah ✓
- Proses cepat ✓

Dapat ditemukan di:
- *Playstore* ✓
- Media sosial ✓

≥113 entitas
107 konvensional
6 syariah

≥947 entitas
2018 ≥404 entitas
2019* 543 entitas

JUMLAH *FINTECH* LEGAL/TERDAFTAR

TEMUAN *FINTECH* ILEGAL

Ket: *) tahun berjalan
Sumber: Satgas Waspada Investasi, OJK, diolah
Bisnis/Patricia Cahya Pratiwi

2. Pikiran Rakyat

Jelang Lebaran, Warga harus Cermat Pilih Fintech

JAKARTA, (PR).-

Perencana keuangan dari Zielts Consulting, Ahmad Gozali meminta masyarakat untuk pintar dalam memanfaatkan pinjaman daring dari perusahaan teknologi finansial (*fintech lending*) jelang Lebaran. Ini sebagai upaya guna mencegah timbulnya masalah karena ketidakmampuan masyarakat dalam mengembalikan pinjaman.

"Yang jelas, yang namanya pinjaman harus dikembalikan, sebelum memutuskan untuk meminjam, mesti terlebih dahulu punya rencana pengembaliannya. Apalagi uang tunai via fintech biasanya memiliki jangka waktu yang sangat pendek dan bunga relatif tinggi," kata Ahmad dalam keterangan resminya dikutip Antara, di Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Ahmad menyarankan masyarakat untuk menggunakan uang pinjaman pada awal bulan Puasa agar mudah ketika mengembalikannya. "Misalnya untuk belanja kebutuhan Lebaran di awal Ramadan saat belum terlalu ramai. Pinjam dulu uangnya dan dikembalikan setelah menerima tunjangan hari raya (THR) di akhir Ramadan," ujarnya.

Selain itu, Ahmad juga menyarankan masyarakat untuk meminjam uang di perusahaan fintech yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena saat ini, masih marak terjadi kasus hukum dalam penagihan utang karena masih ada masyarakat yang meminjam uang di fintech ilegal.

"Jika fintech sudah terdaftar di OJK, mereka harus mengikuti standar perilaku dalam penagihan. Tidak boleh sembarangan," tuturnya.

Dengan memilih fintech yang sudah terdaftar di OJK, Ahmad menambahkan, kerahasiaan dan keamanan data peminjam tetap terjaga. "Jadi bukan hanya masalah etika penagihan, ya tetapi juga masalah kerahasiaan dan keamanan data pribadi kita," ujarnya.

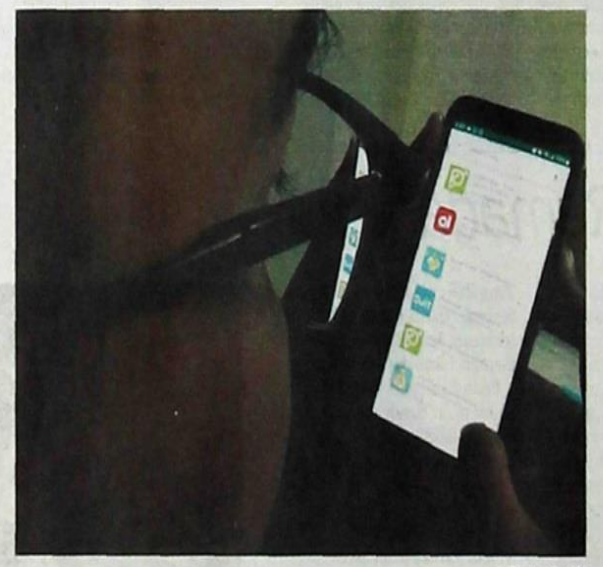

ANDRI GURNITA/"PR"

*WARGA mengamati sejumlah aplikasi yang menawarkan pinjaman di Bandung, Jumat (10/5/2019). Masyarakat disarankan agar meminjam uang di perusahaan fintech yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).**

Disarankan legal

Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Tumbur Pardede mengatakan, permintaan pinjaman pada bulan Puasa tahun ini diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun lalu.

Sebelum puasa pada Mei 2018 lalu, jumlah akumulasi penyaluran pinjaman meningkat 13,65 persen. Selama puasa, Juni 2018, jumlah akumulasi penyaluran pinjaman meningkat 24,03 persen. Setelah puasa, Juli 2018, jumlahnya meningkat sebesar 20,55 persen.

"Untuk tahun ini 2019, kami memperkirakan kenaikannya melebihi dari tahun lalu seiring bertambahnya jumlah penyelenggaraan *fintech lending* dan meningkatnya pemahaman masyarakat soal *fintech lending*," kata Tumbur.

Direktur Pengaturan, Pengawasan, dan Perizinan Fintech OJK, Hendrikus Passagi, menyatakan regulator tengah memfokuskan perlindungan terhadap konsumen. Untuk itu, OJK kini tengah gencar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat awam dalam memilih fintech legal atau yang sudah terdaftar di OJK.

"Perlindungan terhadap konsumen menjadi prioritas OJK. Dengan melakukan sosialisasi, kami berharap permasalahan yang kerap terjadi seperti masalah penagihan dan gagal bayar pinjaman dapat terus berkurang," ujar Hendrikus. **(Kodar Solihat)*****

MONITORING KHUSUS

Tidak terdapat berita terkait Uji Materi UU OJK di media cetak pada hari ini.

Direktorat Humas
Bagian Strategi dan Pelayanan Informasi
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 2
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta
Email: humas@ojk.go.id